

Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023

Abdul Aziz, Abdul Husenudin

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

abdul.aziz@iuqibogor.ac.id, abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id

ABSTRACT

The high level of poverty in West Java is a significant obstacle in the context of economic development efforts in this province. The problem of poverty is a serious focus that must be addressed by regional governments, considering that this reflects the level of community welfare at the regional level. The negative impacts of poverty show significant variations, include serious social problems, and have the potential to affect development progress in a region or country. This analysis uses panel data analysis, which is a combination of cross section and time series data. There are 3 methods used to estimate panel data regression analysis models, namely: Random Effect Model, Fixed Effect Model, and Common Effect Mode. Test methods such as the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test. Then a classical assumption test is carried out and ends with a hypothesis test. The regional minimum wage (UMR) partially has a probability of 0.000 which is lower than 0.10 and the calculated t value of the regional minimum wage variable is greater than the t table value ($5.413282 > 2.05183$), indicating that the regional minimum wage has a positive and significant influence towards reducing poverty levels in West Java Province. Meanwhile, the results of the analysis show a coefficient value of -3.045716, indicating that there is a significant negative influence between the human development index (HDI) and the poverty level in West Java Province

Keywords: Regional Minimum Wage (UMR), Human Development Index (IMP), Poverty

ABSTRAK

Tingkat kemiskinan yang mencapai tingkat yang tinggi di Jawa Barat menjadi hambatan yang signifikan dalam rangka upaya pengembangan ekonomi di provinsi ini. Permasalahan kemiskinan menjadi fokus serius yang harus diatasi oleh pemerintah daerah, mengingat hal tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Dampak negatif dari keadaan kemiskinan menunjukkan variasi yang signifikan, mencakup masalah sosial yang serius, serta berpotensi mempengaruhi kemajuan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Analisis ini menggunakan analisis data panel, yang merupakan kombinasi dari data Deret hitung (cross section) dan deret waktu (time series). Adapun 3 metode yang digunakan guna mengestimasi model analisis regresi data panel, yaitu: Random Effect Model, Fixed Effect Model, dan Common Effect Mode. Metode pengujian seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan diakhiri dengan uji hipotesis. Upah minimum regional (UMR) sebagian memiliki probabilitas sebesar 0.000 lebih rendah daripada 0.10 dan nilai t hitung variabel upah minimum regional lebih besar dari pada nilai t tabel ($5,413282 > 2,05183$), menunjukkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reduksi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Hasil

analisis menunjukkan nilai koefisien -3.045716 , mengindikasikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Kata Kunci: Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IMP), Kemiskinan

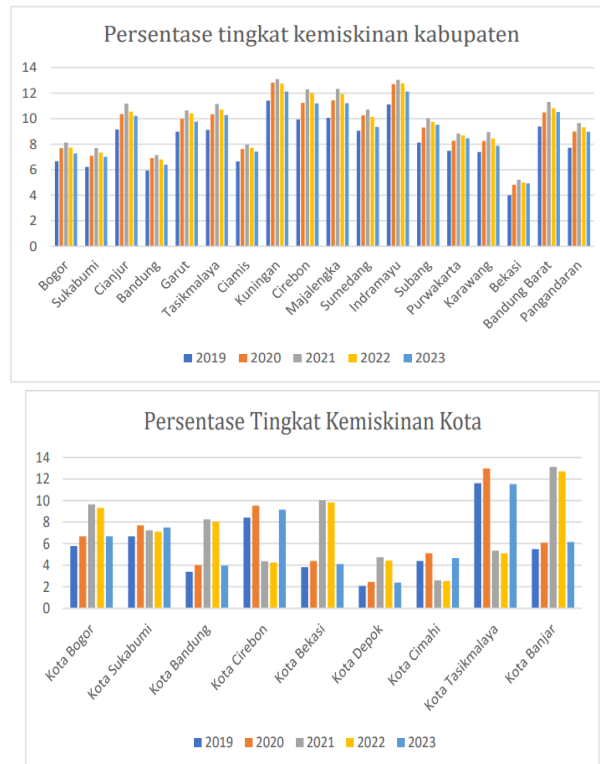
PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam proses pembangunan adalah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Ketidaksetaraan antara masyarakat yang berkecukupan dengan masyarakat yang tidak berkecukupan menjadi salah satu isu dalam struktur ekonomi di suatu negara. Kemiskinan adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh Banyak negara di dunia. Kemiskinan ini menimbulkan masyarakat dalam suatu negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, selain itu mereka pun selalu mendapatkan perlakuan yang tidak setara. Kemiskinan mencakup aspek material dan non-material yang kurang memadai dalam kehidupan, sehingga berdampak pada masalah-masalah lain yang berawal dari kemiskinan tersebut (Sukmaraga: 2011). Kemiskinan ini merupakan masalah yang muncul yang diakibatkan oleh masyarakat yang memiliki sumber pendapatan yang kurang stabil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga diakibatkan oleh masyarakat yang tidak dapat menjalani hidupnya dengan optimal (Wulandari: 2019).

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat menjadi kendala signifikan dalam upaya pengembangan ekonomi di provinsi ini. Kemiskinan merupakan isu serius yang harus diatasi oleh pemerintah daerah karena hal ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Dampak buruk dari kemiskinan sangat bervariasi, termasuk masalah sosial yang serius, dan juga memengaruhi kemajuan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan secara umum dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti kebutuhan mendapatkan Pendidikan yang bagus, pangan yang bergizi, kaya akan sumber daya alam, pekerjaan yang layak, kesehatan, lingkungan yang aman, air mengalir yang bersih, hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta melindungi diri dari ancaman kekerasan, telah terpenuhi (Novianto: 2018).

Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan. Meskipun Provinsi Jawa Barat tidak termasuk dalam daftar provinsi paling miskin di Provinsi Jawa Barat, namun tingkat kemiskinan di sana mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini belum sepenuhnya terwujud. Berikut adalah grafik yang menampilkan perubahan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2022.

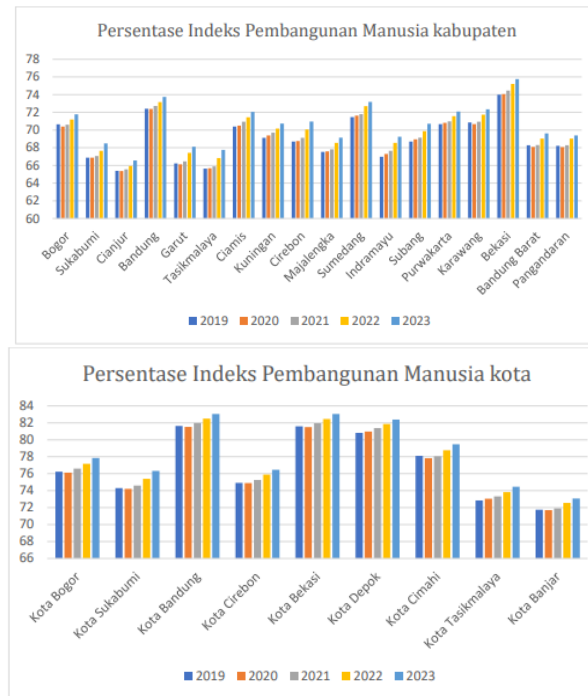
Gambar 1. Persentase tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di provinsi jawa barat tahun 2019-2023



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 terdapat variasi tingkat kemiskinan yang signifikan antar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejumlah daerah seperti Cianjur, Bandung, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan Subang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, terutama pada tahun-tahun tertentu. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam merancang dan melaksanakan program-program untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. 2, Dari data tingkat kemiskinan di beberapa kota di Jawa Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan Kota Depok memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan kota lainnya dalam daftar. Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cirebon memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya. Beberapa kota, seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi, mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Kota Cimahi menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Beberapa daerah memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, sedangkan yang lainnya lebih rendah. Beberapa daerah menunjukkan perbedaan tren tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Ada yang mengalami penurunan, namun ada pula yang mengalami peningkatan. Hal ini

Gambar 3. Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2019-2023



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/> , 2023

sebagian besar kabupaten di Jawa Barat mengalami peningkatan IPM dari tahun 2019 hingga 2023. Ini mencerminkan adanya upaya pembangunan yang dilakukan dalam berbagai sektor. Kabupaten Bekasi mencatatkan IPM tertinggi pada tahun 2020 dengan nilai 74,07 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini bisa mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi di wilayah tersebut. Beberapa kabupaten seperti Bogor, Bandung, dan Purwakarta menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Kota Bandung menduduki peringkat tertinggi dalam IPM di Provinsi Jabar di tahun 2022, dengan angka sebesar 82,50%. Posisi kedua ditempati oleh Kota Bekasi dengan IPM sekitar 82,46%, sementara Kota Depok menempati posisi ketiga dengan IPM sekitar 81,86%. Tiga wilayah ini secara berurutan telah mempertahankan posisi mereka sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2022.

Namun, menurut Lestari, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dalam IPM di Provinsi Jawa Barat, tingkat kemiskinan tetap menjadi yang terbanyak dan menjadi suatu permasalahan mendesak dan harus segera diselesaikan. Terdapat berbagai faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun saat ini, yang paling berpengaruh adalah tingkat pengangguran, pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui IPM

(Lestari: 2017). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahihody, ditemukan bahwa upah dan IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Safuridar menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan jumlah penduduk dalam IPM yang memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan di Aceh Bagian Timur. Penelitian safuridar memberikan hasil bahwa ada variasi dalam pengaruh variabelvariabel ini di berbagai daerah Aceh Bagian Timur, dengan beberapa daerah yang memiliki pengaruh yang signifikan dan beberapa yang tidak begitu signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Safuridar: 2019).

Namun, menurut Ade dan Syechalad, Pemerintah berupaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah atau di pusat dengan cara menciptakan beragam peluang pekerjaan, mendukung berdirinya UMKM melalui pemberian modal serta menyelenggarakan pengembangan potensi dan kreativitas masyarakat daerah setempat agar dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengatasi permasalahan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (Ade & Syechalad: 2016).

TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan adalah fokus utama yang menjadi permasalahan mendasar yang perlu diatasi oleh warga yang kurang mampu, yang seringkali memiliki pendapatan yang tidak mencukupi atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali (Ayu S. & Lilik Sugiharti: 2016). Kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu atau masyarakat memiliki tingkat kehidupan yang rendah, atau ketika mereka tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka serta kebutuhan lainnya. Kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh pendapatan harian yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dampaknya, kemiskinan dapat secara signifikan mengurangi kemampuan untuk memenuhi standar hidup yang mencakup kesehatan dan pendidikan, dan ini dapat menyebabkan munculnya masalah sosial dalam masyarakat (Soemitro & Priyono Tjiptoherijanto: 2002).

Bank Dunia menyatakan bahwa standar minimum kemiskinan dapat diukur berdasarkan dengan pendapatan per kapita. Dalam hal pengukuran standar kemiskinan World Bank pun menyatakan bahwa standar terkecil adalah sebesar USD \$2 per orang dalam per hari. Pada umumnya, konsep tingkat kemiskinan yang dijelaskan oleh Mudrajat dapat dibagi menjadi tiga kategori: a) Kemiskinan relative, b) Kemiskinan absolut, dan c) Kemiskinan kultural (Mudrajad Kuncoro: 1997).

Kemiskinan memiliki beragam penyebab, salah satunya menurut (World Bank) adalah berkurangnya pendapatan dan aset yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

Masyarakat yang dikategorikan miskin jika Ketika masyarakat tidak bekerja atau mengalami pengangguran, seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan masalah kesehatan yang kurang memadai (Zulkifli: 2016).

Selain itu, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, upah kerja minimum, distribusi pemasukan, laju inflasi, pendapatan pajak, peluang lowongan kerja, subsidi pemerintah. Investasi sumber daya alam, alokasi pemanfaatan sumber daya alam, dan kualitasnya juga berperan penting dalam menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor seperti fasilitas umum, teknologi, pendidikan, kondisi alam, politik domestik, bencana alam, dan konflik bersenjata juga dapat menjadi penyebab kemiskinan (Mudrajad Kuncoro: 1997).

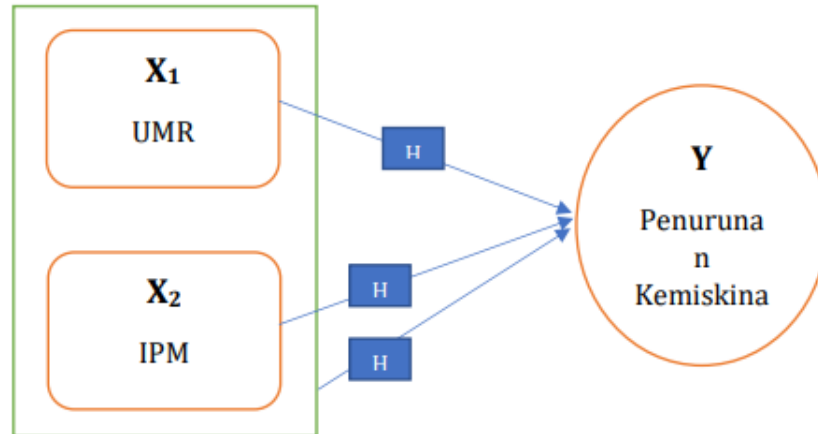
UMR adalah jumlah pendapatan bulanan minimum yang diberikan kepada karyawan oleh pengusaha sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Besaran upah minimum ini disepakati berbentuk uang kemudian diatur berdasarkan peraturan sesuai undang-pundang hukum yang disetujui serta dapat disesuaikan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha (Asri Wijayanti, 2010). Hal ini diatur oleh PP No. 8/1981 dan dapat diterapkan secara sektoral, sub-sektoral dan regional. Namun, saat ini, umumnya yang diterapkan oleh setiap daerah adalah upah minimum regional (Sitepu et al.: 2007).

IPM merupakan sebuah metrik yang dapat mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan dengan jumlah komponen dasar yang memengaruhi kualitas hidup. IPM digunakan untuk mengategorikan tingkat perkembangan suatu negara, apakah itu sebagai negara modern, negara masih berkembang, atau negara yang masih tertinggal. Selain itu, indeks perkembangan manusia juga berfungsi untuk menilai pengaruh sebuah kebijakan penerapan pemerintah dalam ekonomi terhadap tingkat kualitas hidup (Feriyanto & Nur: 2014).

Menurut Quinlivan dan Davies menyatakan bahwa IPM ini merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk membandingkan harapan hidup, akses pendidikan, tingkat memahami huruf, dan tingkat standar kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di seluruh dunia. IPM memiliki kemampuan dalam menilai peningkatan nilai rata-rata suatu wilayah negara kedalam tiga aspek utama (Davies & G. Quinlivan: 2006), yaitu: a) Kualitas kehidupan yang sejahtera dapat diukur dengan memakai Pendapatan Domestik Bruto (GDP) per kapita dalam paritas daya beli, b) Pendidikan dapat dinilai melalui tingkat memahami huruf orang dewasa dan juga melibatkan rasio penerimaan bruto, dan c) Kesehatan yang baik dan tingkat harapan hidup yang panjang dapat diukur melalui harapan hidup pada awal kelahiran.

Peneliti menguraikan sebuah konsep kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam melaksanakan penelitian, dengan tujuan mengklarifikasi dasar pemikiran yang mendasari penelitian tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: data diolah penulis, 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akurat dan tepat memerlukan penerapan metodologi yang sesuai. Oleh karena itu, peneliti harus memilih metode penelitian yang cocok, karena pilihan metodologi sangat memengaruhi hasil yang diharapkan. Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologi kuantitatif asosiatif yang merupakan jenis penelitian dengan memungkinkan pengklasifikasian, observasi, pengukuran, serta analisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang terlibat. Penelitian ini merupakan kategori penelitian kuantitatif asosiatif, memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono: 2014).

Populasi pada penelitian ini terdiri dari jumlah masyarakat miskin, data UMR, dan data IPM yang telah dihimpun oleh BPS di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari 27 wilayah Kabupaten dan Kota di daerah Provinsi Jawa Barat, yang mencakup data masyarakat miskin, data UMR, dan data IPM dari tahun 2019-2023. Analisis ini menggunakan analisis data panel, yang merupakan kombinasi dari data Deret hitung (cross section) dan deret waktu (time series). Adapun 3 metode yang digunakan guna mengestimasi model analisis regresi data panel, yaitu: Random Effect Model, Fixed Effect Model, dan Common Effect Mode (Agus Widarjono: 2013). Metode pengujian seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan diakhiri dengan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu penelitian, pemilihan model memiliki signifikansi penting. Untuk memastikan pemilihan model yang akurat, perlu dilakukan serangkaian metode pengujian. Metode-metode tersebut mencakup uji Chow, dan uji Hausman.

1. Hasil Uji Chow

Dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis ini jika nilai F-statistik yang dihitung lebih besar daripada nilai F-tabel, maka H_0 akan ditolak dan H_1 diterima, dan sebaliknya. Hasil uji Chow menggunakan perangkat lunak Eviews10 dapat ditemukan pada keluaran analisis.

Tabel 3.1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	49.683460	(26,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	348.191226	26	0.0000

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dari Tabel diatas terlihat bahwa hasil uji Chow menunjukkan nilai F-statistik atau F Cross-section sebesar 0,0000, yang lebih rendah daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model efek tetap dipilih (*Fixed Effect Model*).

2. Hasil Uji Hausman

Pengujian Hausman adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan pilihan antara model efek tetap atau efek acak. Pengujian ini melibatkan formulasi hipotesis sebagai berikut: H_0 menyatakan bahwa model efek acak dipilih jika nilai chisquare tidak signifikan pada tingkat signifikansi α 10%, sedangkan H_1 menyatakan bahwa model efek tetap dipilih jika nilai chi-square signifikan pada tingkat signifikansi α 10%. Hasil dari pengujian Hausman menggunakan perangkat lunak Eviews10 telah diperoleh.

Tabel 3.2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.903028	2	0.0000

Sumber: Data dioleh penulis, 2023

hasil uji Hausman menunjukkan nilai F-statistik atau Crosssection random sebesar 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05 yang sesuai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 (hipotesis nol) ditolak, dan H_1 (hipotesis alternatif) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model fixed effect (Fixed Effect Model) dipilih

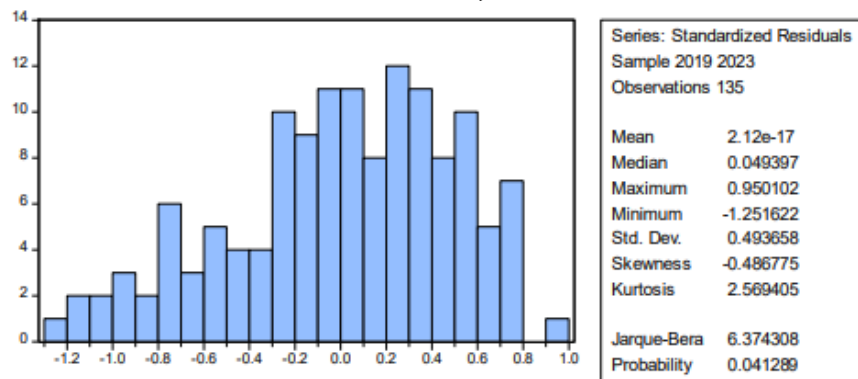
3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini penting karena metode estimasi data panel dengan efek umum dan efek tetap menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), sesuai dengan panduan Gujarati (2013).

a. Hasil Uji Normalitas

Berikut adalah output uji normalitas yang diperoleh melalui perangkat lunak Eviews10. Berdasarkan Gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai JarqueBera yang melebihi ($>$) nilai alpha 0,10, mengindikasikan bahwa residualnya mengikuti distribusi normal.

Gambar 3.1 Hasil Uji normalitas

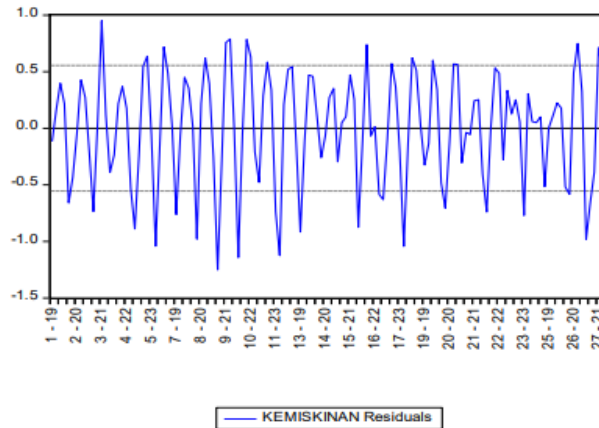


Sumber: Data dioleh penulis, 2023

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Identifikasi heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas. Hasil uji heteroskedastisitas telah diperoleh menggunakan perangkat lunak Eviews10.

Gambar 3.2 Hasil Uji heteroskedastisitas



Sumber: Data dioleh penulis, 2023

Berdasarkan data dalam Gambar 3.2, Dari grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500) artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Jika nilai R2 tinggi di atas 0,80, maka uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien slope parsial secara simultan sama dengan nol, tetapi uji t individual menunjukkan sangat sedikit koefisien slope parsial yang secara statistik berbeda dengan nol atau Koefisien antar dua variabel independent yang melebihi 0,80 dapat menjadi pertanda bahwa multikolinearitas merupakan masalah serius.

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

	UMR	IPM
UMR	1.000000	0.556690
IPM	0.556690	1.000000

Sumber: Data dioleh penulis, 2023

Koefisien korelasi x1 dan x2 adalah $0.556690 < 0.80$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson digunakan sebagai metode untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam data. Dalam penelitian ini, perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan tabel Durbin-Watson (dl dan

du) sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati (2004). Hasil uji autokorelasi dilaporkan melalui program Eviews10.

Tabel 3.4 Hasil uji Autokorelasi

R-squared	0.968022	Mean dependent var	8.326370
Adjusted R-squared	0.959574	S.D. dependent var	2.760561
S.E. of regression	0.555041	Akaike info criterion	1.848246
Sum squared resid	32.65552	Schwarz criterion	2.472342
Log likelihood	-95.75660	Hannan-Quinn criter.	2.101861
F-statistic	114.5976	Durbin-Watson stat	1.504405
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data dioleh penulis, 2023

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji autokorelasi nilai Durbin-Watson sebesar 1,504405 dan nilai du sebesar 1,2399 artinya $dw > du$ dan $dw < 4-du$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini memanfaatkan beberapa jenis uji, seperti uji Parsial, uji Simultan, dan uji Koefisien Determinasi. Tujuan dari pengujian hipotesis ini adalah untuk menilai apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

a. Uji Simultan

Penelitian secara serentak (Uji Simultan) ini dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh atau keterkaitan yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis serentak (Uji Simultan) yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews10.

Tabel 3.6 Hasil Uji Simultan

F-statistic	114.5976
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data dioleh penulis, 2023

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa Prob(F-statistic) pada model fixed effect menunjukkan nilai 0,000000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,10. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, variabel independen seperti upah minimum regional dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yakni tingkat kemiskinan.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai R^2 mendekati satu, hal tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 3.7 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.968022
Adjusted R-squared	0.959574

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dengan menggunakan fixed effect mencapai 0.959574. Hal ini mengindikasikan tingkat kemampuan model untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 95,9 persen. Sisanya, yaitu 0,41 persen, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model regresi fixed effect.

c. Uji Parsial

Pengujian parsial dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian parsial yang dihasilkan melalui aplikasi Eviews10.

Tabel 3.5 Hasil Pengujian parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.40438	7.773722	3.653897	0.0004
UMR	2.07E-06	3.82E-07	5.413282	0.0000
IPM	-0.364450	0.119660	-3.045716	0.0029

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa variabel upah minimum regional memiliki probabilitas sebesar 0.000 lebih rendah daripada 0.10 dan nilai t hitung variabel upah minimum regional lebih besar dari pada nilai t tabel ($5,413282 > 2,05183$), Hasil tersebut menunjukkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, variabel indeks pembangunan manusia memiliki probabilitas 0,0029, atau lebih rendah daripada 0.10, dengan dan nilai t hitung variabel upah minimum regional lebih besar dari pada nilai t tabel ($-3.045716 > 2,05183$).

Hal ini menandakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap reduksi kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan UMR di beberapa Kabupaten/Kota cenderung mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Kenaikan UMR di Kabupaten/Kota mendorong angkatan kerja untuk aktif mencari pekerjaan, sehingga jumlah penawaran tenaga kerja meningkat. Di sisi lain, pengusaha cenderung mengurangi permintaan tenaga kerja karena harus membayar gaji/ upah di atas UMR yang telah ditetapkan oleh setiap Kabupaten/Kota.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaucef Gellab, yang menyatakan bahwa penerapan upah minimum dapat mengurangi kemiskinan. Faktanya, pemberian upah minimum oleh pemerintah tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiwik Iwidyarningsih (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi upah minimum, semakin rendah jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, menunjukkan bahwa upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Kesimpulannya, penelitian ini menyajikan hasil yang berbeda dari teori umum, di mana upah minimum sebenarnya memberikan dampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun, perbedaan ini dapat dijelaskan oleh adanya biaya sosial dari inflasi, di mana kenaikan inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah minimum.

Secara bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia secara simultan memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode yang sama. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Implikasinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Peran pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, dianggap krusial dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan bagi pendidik, serta penyediaan alat dan kebutuhan untuk proses pembelajaran menjadi langkah yang esensial. Melalui investasi ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualifikasi mereka, sehingga dapat bersaing dalam dunia ilmu pengetahuan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dinata (2020) yang mengkaji pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Riau, hasil temuan kami juga menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN

Upah minimum regional (UMR) sebagian memiliki probabilitas sebesar 0.000 lebih rendah daripada 0.10 dan nilai t hitung variabel upah minimum regional lebih besar dari pada nilai t tabel ($5,413282 > 2,05183$), Hasil tersebut menunjukkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reduksi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2019-2023. Secara individual, terdapat indikasi yang kuat bahwa indeks pembangunan manusia memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2023, dengan probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,10 (10% signifikan).

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien -3.045716, mengindikasikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode tersebut. Meskipun demikian, secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada rentang waktu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, S., & Syechalad, M. N. (2016), Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah. Mahasiswa (Jim) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(2), 545-554.
- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*. Ekonosia.
- Alfredo, (2018), Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 24-34
- Arikunto, (2013), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Asri Wijayanti, (2010), *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Ayu S., & Lilik Sugiharti, (2016), Faktor-faktor Penentu Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2).

- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014), Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Davies, A., & G. Quinlivan, (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development. *Journal of Socioeconomics*.
- Feriyanto, & Nur, (2014), Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat. UPP STIM YKPN.
- Jabar BPS. (2023, October 4). jumlah penduduk miskin di provinsi jawa barat. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.
- Lestari, (2017), Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Mudrajad Kuncoro, (1997), *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP-AMP YKPN.
- Najmi, (2019), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 3(1), 36–47.
- Novianto, (2018), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*, 1–16.
- Panjawa, J., & Soebagiyo, (2014), Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 48–54.
- Safuridar, (2019), Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 34–46.
- Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus, & Yanti, (2020), Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 116–137.
- Sitepu, Rasidin K., & Bonar M. Sinaga, (2007), Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. *SOCA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(2).
- Soemitro, & Prijono Tjiptoherijanto, (2002), Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Provinsi Jawa Barat.
- Rineka Cipta. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sukmaraga, (2011), Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita , Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi.
- Wulandari, (2019), Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi Penduduk Miskin, Dan Indeks Gini Dengan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis, 53(9), 1689–1699.
- Zulkifli, (2016), Pengaruh Upah Minimum Regional (Umr) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan. . . Journal Ecces, 3(2), 90–106.